

**PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI
TERHADAP TERPIDANA MATI KASUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

TESIS

Oleh:
ALI JOHARDI WIROGIOTO
201620251011



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Kasus Tindak Pidana Narkotika**
Nama Mahasiswa : Ali Johardi Wirogioto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251011
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., , MM

NIDN : -

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

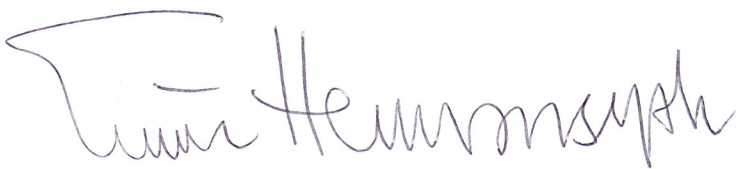
NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap
Terpidana Mati Kasus Tindak Pidana Narkotika
(Study Kasus Siegfried Mets)

Nama Mahasiswa : Ali Johardi Wirogioto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251011

Program Studi/Program : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta,

2018

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Prof. I Made Widnyana, S.H., M.H.

NIDN: -



DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H

NIDN: 0319046403

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Kasus Tindak Pidana Narkotika.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Ali Johardi Wirogioto
201620251011

ABSTRAK

Ali Johardi Wirogioto. 201620251011. Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Mati terhadap Terpidana Mati Kasus Tindak Pidana Narkotika

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*. Indonesia terakhir melakukan eksekusi mati di tahun 2016 terhadap 4 orang terpidana mati, sebelumnya di tahun 2015 Indonesia mengeksekusi 14 orang terpidana mati. Pada 2017, Kejaksaan Agung RI masih tetap berencana melakukan upaya eksekusi mati. Saat ini sedikitnya 165 orang masih masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati. Masa menunggu yang lama ini terjadi karena para terpidana mati mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa yang tidak ada pembatasan waktunya. Hal ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh para terpidana mati untuk mengulur-ulur waktu eksekusi. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: memberikan penjelasan yang bersifat teoritis mengenai mengapa proses eksekusi tidak segera dilaksanakan setelah vonis dijatuhkan, sehingga dapat memberikan pandangan dan informasi yang akurat atau setidaknya-tidaknya menjadi sebuah pemikiran dari penulis dalam rangka memperkaya dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis, dimana peneliti mengadakan penelaahan dokumen dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan (keterangan ahli pemerintah, ahli hukum, tokoh masyarakat, dan terpidana mati) untuk mengetahui tanggapan-tanggapan mereka terhadap penundaan eksekusi mati terpidana kasus narkotika. Penelitian ini mengambil lokasi di Jakarta pada bulan Mei - Juni 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan eksekusi mati, dikarenakan adanya pengaruh kebijakan politik pemerintah terhadap dinamika sistem pidana yang berlaku di Indonesia serta belum maksimalnya fungsi Jaksa sebagai eksekutor pidana mati.

Kata Kunci: Eksekusi Mati, Tindak Pidana Narkotika, Jaksa

ABSTRACT

Ali Johardi Wirogioto. 201620251011. *Delays in the Execution of Death Penalty to the Narcotics Death Convicted*

Indonesia is one of the countries in the world who still apply capital punishment in the criminal code. The death penalty is the most severe sanction among all types of criminal and is the oldest, heaviest and often the most violent and controversial type of criminal law of all criminal systems, both in Common Law countries and countries that embrace Civil Law. Indonesia last executed death in 2016 against 4 people sentenced to death, before in 2015 Indonesia executed 14 people sentenced to death. In 2017, the Attorney General's Office is still planning to execute death efforts. Currently at least 165 people are still on the waiting list dead execution. This long waiting period occurs because the death row inmates apply a remarkable ordinary and extraordinary law that has no time restrictions. This is a gap that can be used by death row inmates to stall the execution time. The objectives of this research are: to provide a theoretical explanation of why the execution process is not immediately implemented after the verdict is dropped, so as to provide accurate views or information or at least be a thought from the author in order to enrich and expand the repertoire of science.

This research uses Qualitative method with socio-juridical approach, where the researcher conducts document review and in-depth interviews conducted on informants (information from government experts, judges, community leaders, and death row convicts) to find out their responses to the delay of execution narcotics. This study took place in Jakarta in May - June 2018. The results of this study indicate that the postponement of execution died, due to the influence of the political will and government policy on the dynamics of the prevailing criminal system in Indonesia and not yet maximal the function of the Prosecutor as the executor of capital punishment.

Keywords: *Death Penalty, Narcotics Crime, Prosecutor*

KATA PENGANTAR

Segala Puji ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Nikmat dan Taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya tesis yang berjudul “Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Kasus Tindak Pidana Narkotika”. Proposal ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. **Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM** selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk dukungannya dalam penyelesaian tesis.
2. **Prof. I Made Widnyana, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
3. **DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan kemudahan dan bimbingan selama penulisan.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Jakarta, Juli 2018

Penulis

Ali Johardi Wirogioto

NPM: 201620251011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS OLEH PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO TESIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konsepsional	11
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	41
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	43
1. Pengertian Tindak Pidana dan Pidana Mati	43
2. Pidana Mati dalam KUHP Indonesia	45
3. Pidana Mati di Luar KUHP Indonesia	48
4. Pidana Mati dalam Rancangan KUHP	52
B. Upaya Hukum Luar Biasa	59

1. Pengertian Upaya Hukum Luar Biasa Menurut KUHAP	59
2. Upaya Hukum Luar Biasa dalam Rancangan KUHAP	67
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI TERPIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pro dan Kontra Hukuman Mati	72
B. Pengaruh Kebijakan Politik terhadap Dinamika Sistem Peradilan Pidana yang Berlaku di Indonesia	79
C. Fungsi Jaksa dalam Proses Eksekusi	89
BAB IV UPAYA MENGATASI PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI TERPIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Adanya <i>Political Will</i> Pemerintah untuk Membenahi Sistem Peradilan Terkait Hukuman Mati	95
B. Penguatan Sistem Hukum Pidana Nasional Terkait Hukuman Mati yang Sesuai dengan Budaya Perkembangan Indonesia Saat ini	100
1. Merevisi UU Narkotika yang Tetap Menerapkan Hukuman Mati..	100
2. Memasukkan Hukuman Mati sebagai Hukuman Pokok Bukan Hukuman Alternative dalam RKUHAP	104
3. Menerbitkan PP Pembatasan Upaya Hukum Luar Biasa	109
4. Menyusun Sistem Hukum Nasional Indonesia	113
C. Mengoptimalkan Peran Jaksa Sebagai Eksekutor dalam Eksekusi Mati Terpidana Kasus Narkotika	116
BAB V KESIMPULAN	
A. Simpulan	120
B. Saran dan Tindak Lanjut	123
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

